BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
بوڤتي اچيه تڠه
ڤروۏينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, menyebutkan bahwa jika Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dapat dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107), Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Standar Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas System Keuangan, (Lembaran Negara : 2020/Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara : 2019/Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara : 2019/Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara : 2019/Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;

15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022;

16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;

17. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025;

18. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022;

19. Qanun ...

19. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021;

20. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022 dan Pemutakhiran RPJMD Sesuai Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;

21. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021

22. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 93 Tahun 2020 tentan Penjabaran Anggaran Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 881) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021 sebagaiman terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini disusun dengan rumusan sebagai berikut :

BAB I ...

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan
BAB III : Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
BAB VI : Penutup

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 Pasal baru yakni Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 3A

(1) Perubahan RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022, yang memuat Kerangka Kerja Ekonomi Daerah, Prioritas Program Daerah, Rencana Kerja, Pengadaan dan Prakiraan Maju termasuk didalamnya arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Aceh Tengah Tahun 2021;

(2) Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :

a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;

b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menyempurnakan Rencana Kerja Tahun 2021.

Pasal 3B

Dalam rangka menyusun RAPBK Perubahan Tahun 2021 :

a. Pemerintah Kabupaten menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai bahan pembahasan KUA-APBK dan PPAS-APBK pada saat pembahasan dengan DPRK ;

b. Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2021 dalam melakukan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Pasal II

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

(2) Peraturan ...

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

SUBHANDHY

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 979